

IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI KABUPATEN MANGGARAI

Ferdinandus Bani¹, Sonia Klara Seke², Ferdinandus Lobo³

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: fandidpores@gmail.com, jjen65271@gmail.com, ferdinandlobo@unwira.ac.id

Abstrak

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pendekatan yang semakin penting dalam pengembangan ekonomi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Manggarai. Sistem perizinan ini bertujuan untuk menyampaikan proses perizinan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Dalam konteks ini, perizinan berfungsi sebagai instrumen hukum mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kepentingan umum, serta melindungi masyarakat dan lingkungan. Namun, tantangan seperti birokrasi yang rumit dan transparansi sering kali menghambat efektivitas sistem ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dalam penerapan perizinan berbasis risiko, serta urgensi pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur hal-hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan regulasi ini, serta sasaran dan ruang lingkup pengaturannya. Yang diharapkan, dengan adanya peraturan yang jelas dan transparan, sistem perizinan berbasis risiko dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan jumlah usaha yang terdaftar, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Manggarai.

Kata kunci: Perizinan, Ekonomi dan Kabupaten Manggarai

Abstract

Risk-based business licensing is an increasingly important approach in economic development in Indonesia, including in Manggarai Regency. This licensing system aims to convey the licensing process by considering the level of risk posed by a business activity. In this context, licensing functions as a legal instrument to regulate and supervise activities that have the potential to affect the public interest, as well as protect the community and the environment. However, challenges such as complicated bureaucracy and transparency often hinder the effectiveness of this system. Therefore, this study aims to identify the problems faced by the Manggarai Regency Regional Government in the implementation of risk-based licensing, as well as the urgency of forming Regional Regulations that regulate these matters. In addition, this study will also discuss the philosophical, sociological, and juridical foundations of the formation of these regulations, as well as the goals and scope of their regulation. It is hoped that with clear and transparent regulations, the risk-based licensing system can encourage local economic growth, increase the number of registered businesses, and create a conducive investment climate in Manggarai Regency.

Keywords: Licensing, Economy and Manggarai Regency

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan merupakan aspek penting dalam pengaturan berbagai kegiatan di masyarakat, baik dalam konteks bisnis, lingkungan, maupun sosial. Di Indonesia, sistem perizinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur dan mengawasi kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kepentingan umum. perizinan berfungsi sebagai pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah terhadap aktivitas masyarakat.¹ Dengan adanya perizinan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga dapat mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Salah satu alasan utama perlunya perizinan adalah untuk melindungi kepentingan publik. Misalnya, dalam sektor kesehatan, izin diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan, sehingga masyarakat dapat menerima layanan yang aman dan berkualitas. Selain itu, dalam konteks lingkungan, perizinan juga berperan dalam mengatur penggunaan sumber daya alam agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan ekosistem. Dalam konteks ini, perizinan mencakup berbagai bentuk seperti pendaftaran dan sertifikasi, serta merupakan instrumen hukum administrasi yang penting untuk mengendalikan dan mengatur perilaku masyarakat demi kepentingan umum.²

Perizinan juga berfungsi sebagai alat pengendalian. Melalui proses perizinan, pemerintah dapat mengawasi dan mengontrol kegiatan yang berpotensi merugikan, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Dengan demikian, perizinan membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun, sistem perizinan di Indonesia sering kali menghadapi tantangan, seperti birokrasi yang rumit dan kurangnya transparansi. Hal ini dapat menghambat investasi dan inovasi, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem perizinan menjadi sangat penting untuk

¹ Adrian Sutedi

² Dr. Ardiansyah” HUKUM PERIZINAN”

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berusaha berbasis risiko merupakan pendekatan yang semakin penting dalam dunia bisnis dan perizinan, terutama di Indonesia melalui OSS RBA, bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan menilai tingkat risiko dari kegiatan usaha.³ Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika pasar. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, pemerintah dan pelaku bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Salah satu latar belakang utama dari berusaha berbasis risiko adalah perubahan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁴. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan mendorong investasi dengan mengalihkan fokus dari pendekatan yang bersifat administratif menjadi pendekatan yang lebih berbasis pada analisis risiko. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk lebih cepat mendapatkan izin, terutama bagi usaha yang dianggap memiliki risiko rendah.

Pendekatan berbasis risiko juga berfungsi untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan masyarakat. Dengan mengkategorikan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan, pemerintah dapat menerapkan regulasi yang lebih ketat pada sektor-sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti industri yang berhubungan dengan lingkungan atau kesehatan. Ini tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap kegiatan usaha yang dilakukan. Namun, implementasi berusaha berbasis risiko tidak tanpa tantangan. Birokrasi yang kompleks dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme ini di kalangan pelaku usaha dapat menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan

³ Dpmptkp, 2021 : “Mendorong Kebangkitan UMK melalui Pendekatan Risiko dalam Perizinan Berusaha”

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

pendidikan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai manfaat dan cara kerja sistem ini.

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pendekatan yang semakin penting dalam pengembangan ekonomi di daerah, termasuk di Kabupaten Manggarai. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Dengan demikian, usaha yang memiliki risiko rendah dapat memperoleh izin dengan lebih cepat dan mudah, sementara usaha dengan risiko tinggi akan melalui proses yang lebih ketat. Di Kabupaten Manggarai, potensi ekonomi yang beragam, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, memberikan peluang besar bagi pengembangan usaha. Namun, tantangan dalam hal perizinan sering kali menjadi penghambat bagi para pengusaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu, penerapan sistem perizinan berbasis risiko diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka.

Regulasi yang jelas dan transparan dalam perizinan berbasis risiko juga penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan adanya sistem ini, diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah usaha yang terdaftar secara resmi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan berbasis risiko, Kabupaten Manggarai dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah usaha yang beroperasi, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan usaha tersebut dalam jangka panjang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Daerah Kab. Manggarai di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kab. Manggarai dalam perizinan berusaha berbasis resiko
2. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah Kab. Manggarai tentang perizinan berusaha berbasis resiko
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kab. Manggarai tentang perizinan berusaha berbasis resiko.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kab. Manggarai tentang perizinan berusaha berbasis resiko

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik ini disusun untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kab. Manggarai tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko . Secara garis besar, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mengetahui:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kab. Manggarai dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Urgensi diperlukannya Peraturan Daerah Kab Manggarai tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kab Manggarai tentang perizinan berusaha berbasis resiko .
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kab Manggarai tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan salah satu metode yang sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan studi pustaka untuk menelaah data-data sekunder peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, atau dapat juga dengan menelaah data-data hasil kajian lainnya. Telaah peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam undang-undang ini, perizinan diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 12, yang menjelaskan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi oleh suatu usaha

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁵

PP 5/2021 merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan ini mencakup pengaturan mengenai tata cara pengajuan izin, pengawasan, serta penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam proses perizinan

Selain itu, peraturan ini juga menetapkan bahwa perizinan harus dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang bertujuan untuk mempermudah akses dan transparansi bagi pelaku usaha.

3. Aspek Pengawasan dan Sanksi

Dalam PP 5/2021, juga diatur mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko serta sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2021). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

Adapun data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, konsultasi publik/mengundang pakar, dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan program program Perizinan Berusaha Berbasis Resiko . Materi studi pustaka berupa kajian dan review terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, website, serta data lain tentang peraturan perundang undangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Resiko .

PEMBAHASAN

1. Permasalahan yang dihadapi di kabupaten Manggarai dalam perizinan berbasis resiko

- Klasifikasi Tingkat Resiko

Klasifikasi Tingkat Risiko dalam perizinan berusaha berbasis risiko adalah metode yang digunakan untuk menilai risiko yang terkait dengan suatu usaha. Di Kabupaten Manggarai, seperti di banyak daerah lainnya, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan pengelolaan izin usaha. Dengan memahami klasifikasi risiko, pihak berwenang dapat mengalokasikan sumber daya lebih efektif dan memprioritaskan usaha dengan risiko lebih tinggi. Klasifikasi tingkat risiko umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama:

- Resiko Rendah

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pendekatan yang penting untuk mengelola dan mengawasi usaha di Kabupaten Manggarai. Salah satu kategori yang menarik untuk dibahas adalah risiko rendah. Usaha dengan risiko rendah biasanya mempunyai dampak minimal terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Dengan memahami karakteristik dan dampak dari usaha ini, kita dapat melihat bagaimana sistem perizinan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Usaha dengan kategori risiko rendah memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Dampak Lingkungan Minimal: Usaha ini tidak menghasilkan limbah berbahaya atau memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan.
2. Operasional Sederhana: Proses operasional yang tidak kompleks dan mudah dikelola, seperti usaha kecil dan menengah (UKM).
3. Persyaratan Perizinan yang Lebih Ringan: Proses pengajuan izin cenderung lebih cepat dan tidak memerlukan banyak dokumen atau persyaratan yang rumit.
4. Dampak Sosial Positif: Usaha ini biasanya berkontribusi positif terhadap masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan lokal.

Beberapa contoh usaha yang termasuk dalam kategori risiko rendah di Kabupaten Manggarai meliputi:

- Usaha Retail Kecil: Toko-toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, seperti sembako dan barang rumah tangga.
- Usaha Jasa: Layanan seperti pencucian mobil, salon kecantikan, atau layanan kebersihan rumah yang tidak berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat
- Usaha Kuliner Kecil: Warung makan atau kafe yang menyajikan makanan lokal dengan proses yang sederhana dan aman.
- Usaha dengan risiko rendah memiliki peran penting dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai. Dengan karakteristik yang mendukung, proses perizinan yang efisien, dan dampak positif terhadap masyarakat, usaha ini dapat menjadi pilar dalam pengembangan ekonomi daerah. Pendekatan yang tepat terhadap perizinan usaha risiko rendah akan membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
- Risiko Sedang atau Menengah

Dalam konteks perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai, kategori risiko sedang atau menengah mencakup usaha-usaha yang memiliki potensi dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan usaha risiko rendah, namun tidak seberat usaha dengan risiko tinggi. Usaha dalam kategori ini memerlukan perhatian dan

pengawasan yang lebih, untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Usaha dengan risiko sedang memiliki beberapa karakteristik kunci, antara lain:

1. Dampak Lingkungan dan Sosial yang Terukur: Usaha ini dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat, meskipun dampaknya tidak seberat usaha risiko tinggi. Misalnya, mereka mungkin menghasilkan limbah yang memerlukan pengelolaan yang tepat.
2. Proses Operasional yang Moderat: Proses bisnis yang lebih kompleks dibandingkan usaha risiko rendah, sering kali melibatkan sejumlah prosedur dan izin tambahan.
3. Kebutuhan untuk Pengawasan yang Lebih Ketat: Usaha ini memerlukan pemantauan dan evaluasi yang lebih intensif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
4. Tanggung Jawab terhadap Kesehatan Masyarakat: Usaha dalam kategori ini sering kali berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, seperti restoran atau fasilitas olahraga.

Beberapa contoh usaha yang termasuk dalam kategori risiko sedang di Kabupaten Manggarai meliputi:

- Restoran dan Kafe: Usaha makanan dan minuman yang perlu mematuhi standar kesehatan dan kebersihan.
- Usaha Properti: Kegiatan pembangunan perumahan atau komersial yang memerlukan izin lingkungan.
- Usaha Manufaktur Kecil: Pabrik kecil yang memproduksi barang konsumsi, yang mungkin menghasilkan limbah tetapi tidak berbahaya.

Usaha dengan risiko sedang di Kabupaten Manggarai memainkan peran penting dalam ekosistem perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan karakteristik yang memerlukan pengawasan lebih, proses perizinan yang jelas, dan dampak yang terukur, usaha ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang tepat terhadap pengelolaan usaha risiko sedang akan

memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara efektif sambil mematuhi peraturan yang ada dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

- **Resiko Tinggi**

Dalam konteks perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai, kategori risiko tinggi mencakup usaha-usaha yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keamanan. Usaha ini memerlukan perhatian dan pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah dan pihak berwenang untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Usaha dengan kategori risiko tinggi biasanya memiliki karakteristik berikut:

1. **Dampak Lingkungan Signifikan:** Usaha ini dapat menghasilkan limbah berbahaya, emisi, atau dampak negatif lain yang dapat merusak lingkungan.
2. **Proses Operasional yang Kompleks:** Usaha ini sering kali melibatkan teknologi canggih atau proses industri yang membutuhkan keahlian khusus.
3. **Regulasi yang Ketat:** Usaha risiko tinggi biasanya harus memenuhi berbagai persyaratan regulasi yang ketat, termasuk izin lingkungan, izin kesehatan, dan izin keselamatan.
4. **Potensi Risiko Kesehatan dan Keselamatan:** Usaha ini dapat menimbulkan risiko langsung terhadap kesehatan masyarakat, seperti industri makanan, pabrik kimia, atau kegiatan konstruksi besar.

Beberapa contoh usaha yang termasuk dalam kategori risiko tinggi di Kabupaten Manggarai antara lain:

- **Industri Manufaktur Berat:** Pabrik yang memproduksi barang-barang berat atau bahan kimia yang dapat menghasilkan limbah berbahaya.
- **Pertambangan:** Kegiatan penambangan yang dapat berdampak besar terhadap lingkungan dan memerlukan studi dampak lingkungan yang mendalam.
- **Usaha Konstruksi Skala Besar:** Proyek pembangunan gedung tinggi atau infrastruktur yang memerlukan pengelolaan risiko yang matang dan izin yang kompleks.

Usaha dengan risiko tinggi di Kabupaten Manggarai memainkan peran yang krusial dalam ekosistem perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan karakteristik yang memerlukan pengawasan ketat, proses perizinan yang kompleks, dan dampak yang signifikan, usaha ini sangat penting untuk dikelola dengan baik. Pendekatan yang tepat terhadap pengelolaan usaha risiko tinggi tidak hanya akan menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan, tetapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut.

- **Proses Perizinan**

Proses perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perizinan. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha sambil tetap memastikan bahwa aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan tetap terjaga. Perizinan berbasis risiko adalah pendekatan yang mengkategorikan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan. Dengan demikian, usaha yang memiliki risiko rendah akan mengalami proses perizinan yang lebih sederhana dibandingkan dengan usaha yang berisiko tinggi.

Langkah-langkah Proses Perizinan di Kabupaten Manggarai, yaitu :

1. **Identifikasi Jenis Usaha:** Pelaku usaha harus mengidentifikasi jenis usaha dan kategori risiko yang sesuai. Kategori ini biasanya ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang berlaku.
2. **Pengajuan Permohonan:** Setelah mengidentifikasi jenis usaha, pelaku usaha mengajukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Manggarai.
3. **Evaluasi dan Verifikasi:** DPMPTSP akan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Untuk usaha berisiko tinggi, proses ini mungkin melibatkan penilaian tambahan dari instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kesehatan.
4. **Penerbitan Izin:** Jika semua persyaratan terpenuhi, izin usaha akan diterbitkan. Untuk usaha berisiko rendah, proses ini biasanya lebih cepat.

5. **Monitoring dan Evaluasi:** Setelah izin diterbitkan, pemerintah akan melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Tantangan dalam Proses Perizinan, antara lain:

1. **Sosialisasi dan Edukasi:** Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami sistem perizinan berbasis risiko, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif.
2. **Sumber Daya Manusia:** Kualitas SDM di DPMPTSP perlu ditingkatkan agar mampu melakukan evaluasi dan monitoring dengan lebih efektif.
3. **Infrastruktur Teknologi:** Penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan dan pengelolaan izin perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses.

Proses perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai merupakan langkah positif untuk mendukung iklim investasi yang sehat. Dengan memahami tahap-tahap dan tantangan yang ada, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah dalam mengurus izin dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pemahaman dan keterlibatan dari semua pihak sangat penting untuk kesuksesan sistem ini.

- **Dampak Terhadap Pelaku Usaha**

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan. Di Kabupaten Manggarai, penerapan sistem ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, namun juga membawa tantangan tersendiri.

- **Dampak Positif**

1. **Penyederhanaan Proses Perizinan :** Dengan perizinan berbasis risiko, proses perizinan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha tidak perlu lagi melalui proses yang panjang dan berbelit-belit untuk mendapatkan izin. Hal ini dapat mempercepat waktu untuk memulai usaha, sehingga pelaku usaha dapat segera beroperasi dan menghasilkan pendapatan.

2. Fokus pada Pengawasan Risiko : Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada usaha yang memiliki risiko tinggi, sehingga pengawasan dan penegakan hukum dapat lebih efektif. Pelaku usaha yang memiliki risiko rendah dapat lebih leluasa menjalankan usaha tanpa merasa tertekan oleh regulasi yang ketat.
 3. Mendorong Investasi : Kemudahan dalam perizinan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Manggarai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dengan adanya lebih banyak investasi, akan tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
- Dampak Negatif
 1. Ketidakpastian Bagi Usaha Kecil : Bagi pelaku usaha kecil, perubahan dalam sistem perizinan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana sistem baru ini bekerja. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang baru, yang pada akhirnya dapat merugikan usaha mereka.
 2. Kemungkinan Penyalahgunaan : Ada risiko bahwa pelaku usaha dengan koneksi tertentu dapat memanfaatkan sistem ini untuk mendapatkan izin dengan cara yang tidak sah. Ini dapat menciptakan ketidakadilan di antara pelaku usaha, di mana mereka yang tidak memiliki koneksi mungkin kesulitan untuk mendapatkan izin.
 3. Tantangan dalam Pengawasan : Meskipun sistem ini fokus pada pengawasan risiko, implementasinya membutuhkan sumber daya yang cukup dari pemerintah daerah. Jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik, ada kemungkinan usaha yang berisiko tinggi tetap beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, terutama dalam hal

penyederhanaan proses dan peningkatan investasi. Namun, tantangan dan risiko yang menyertainya harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan pelaku usaha, terutama usaha kecil. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan efektif dan adil.

- **Tantangan dan Solusi**

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan sistem yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan iklim investasi. Meskipun demikian, di Kabupaten Manggarai, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya:

1. **Pemahaman dan Sosialisasi**

- **Tantangan :** Masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami konsep perizinan berbasis risiko. Sosialisasi yang kurang memadai membuat mereka ragu dan bingung dalam mengajukan izin.
- **Solusi :** Mengadakan seminar dan workshop untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perizinan berbasis risiko dan manfaatnya bagi pelaku usaha.

2. **Infrastruktur dan Teknologi**

- **Tantangan:** Keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi informasi di beberapa daerah di Manggarai dapat menghambat proses pengajuan izin secara online.
- **Solusi:** Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan menyediakan akses internet yang lebih baik, serta membangun sistem perizinan yang user-friendly.

3. **Koordinasi Antar Instansi**

- **Tantangan:** Kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan.

- Solusi: Membangun sistem koordinasi yang efektif antar instansi, termasuk pembentukan tim khusus untuk menangani perizinan berbasis risiko.

4. Penegakan Hukum dan Kepatuhan

- Tantangan : Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perizinan yang dapat mengganggu keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem.
- Solusi : Memperkuat penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar, serta melakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan.

5. Sumber Daya Manusia

- Tantangan : Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia dalam mengelola perizinan berbasis risiko dapat mengurangi efektivitas sistem.
- Solusi : Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas yang menangani perizinan, serta melibatkan ahli dari luar untuk memberikan pelatihan.

Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan. Dengan pendekatan yang tepat, seperti peningkatan sosialisasi, infrastruktur, koordinasi, penegakan hukum, dan pengembangan sumber daya manusia, tantangan-tantangan ini dapat diatasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di daerah tersebut

2. Peraturan yang memuat tentang perizinan berbasis resiko

- Analisis Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu inovasi dalam sistem perizinan di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Materi muatan

dari peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha berbasis risiko mencakup beberapa aspek penting:

1. **Klasifikasi Risiko:** Peraturan ini mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan, yaitu risiko rendah, menengah, dan tinggi. Klasifikasi ini menentukan jenis izin yang diperlukan dan prosedur yang harus diikuti oleh pelaku usaha.
2. **Prosedur Perizinan:** Prosedur perizinan diatur sedemikian rupa agar lebih efisien. Untuk usaha dengan risiko rendah, proses perizinan dapat dilakukan secara lebih sederhana, sedangkan untuk usaha dengan risiko tinggi, prosedur yang lebih ketat dan detail diperlukan.
3. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Peraturan ini juga mencakup mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang diberikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.
4. **Sistem Elektronik:** Implementasi sistem perizinan berbasis risiko juga melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengajuan dan penerbitan izin. Hal ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi.

Di Kabupaten Manggarai, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- **Meningkatkan Investasi:** Dengan proses perizinan yang lebih cepat dan efisien, diharapkan akan menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di daerah ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian lokal.
- **Mendorong Usaha Kecil dan Menengah (UKM):** Usaha dengan risiko rendah, seperti UKM, akan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan izin, sehingga dapat lebih mudah untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka

- **Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik:** Dengan adanya klasifikasi risiko, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mengawasi usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Di Kabupaten Manggarai, penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, sambil tetap menjaga pengawasan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini. Berikut adalah pembahasan mengenai lima peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha berbasis risiko:

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

UU Cipta Kerja merupakan salah satu landasan utama dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Undang-undang ini memperkenalkan penyederhanaan perizinan dan mengklasifikasikan usaha berdasarkan risiko yang ditimbulkan. Usaha yang memiliki risiko rendah dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui izin usaha mikro dan kecil (IUMK), sedangkan usaha dengan risiko tinggi memerlukan izin yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemudahan berusaha sekaligus menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.**

PP ini menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan berusaha. Di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai tata cara pengajuan izin, jenis-jenis izin yang diperlukan, serta prosedur evaluasi berdasarkan risiko. Peraturan ini juga mengatur tentang sistem perizinan online yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas.

- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha yang Dibuka dan Ditutup untuk Investasi.

Perpres ini mengatur tentang sektor-sektor usaha yang terbuka untuk investasi serta yang ditutup. Dalam konteks perizinan berbasis risiko, Perpres ini juga memberi gambaran mengenai klasifikasi risiko dari berbagai bidang usaha. Sektor yang dianggap berisiko tinggi akan dikenakan persyaratan perizinan yang lebih ketat, sementara sektor dengan risiko rendah akan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan izin.

- Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Berusaha.

Peraturan ini memberikan pedoman operasional bagi pelaksana perizinan berusaha. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai analisis risiko yang harus dilakukan oleh pemohon izin, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang telah mendapatkan izin. Ini memastikan bahwa izin yang diberikan sesuai dengan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan.

- Peraturan Daerah terkait Perizinan Berusaha

Selain peraturan di tingkat nasional, masing-masing daerah juga memiliki peraturan yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing. Perda ini mengatur tata cara, syarat, dan prosedur perizinan yang relevan dengan karakteristik usaha di daerah tersebut, serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Melalui berbagai peraturan perundang-undangan ini, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Pendekatan berbasis risiko diharapkan dapat mempercepat proses perizinan sekaligus menjaga standar keselamatan dan kesehatan, yang merupakan prioritas utama dalam pengembangan usaha di Indonesia.

Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar Peraturan Perundang-Undangan

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan perizinan berusaha, terutama dalam konteks berbasis risiko. Di Kabupaten Manggarai, upaya ini bertujuan untuk menciptakan suatu kerangka hukum yang efektif dan efisien, mendukung iklim investasi, serta melindungi masyarakat dan lingkungan.

Sinkronisasi adalah proses penyesuaian antar peraturan untuk memastikan bahwa mereka saling mendukung dan tidak bertentangan. Sementara itu, harmonisasi melibatkan penciptaan keselarasan dalam peraturan yang berbeda agar mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks perizinan berusaha, kedua konsep ini sangat penting untuk mengurangi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum⁶. Di Kabupaten Manggarai, tantangan dalam sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha berbasis risiko antara lain:

- Banyaknya regulasi yang harus disesuaikan, baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten.
- Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip perizinan berbasis risiko di kalangan stakeholder.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang mampu melakukan analisis risiko secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan di Kabupaten Manggarai meliputi:

- Pelatihan dan sosialisasi tentang perizinan berbasis risiko kepada aparat pemerintah dan pelaku usaha.
- Penyusunan dokumen hukum yang jelas dan terintegrasi untuk memudahkan pemahaman dan implementasi.

⁶ Partisipasi Pemangku Kepentingan Inovasi. (2023). Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kab. Manggarai

- Kolaborasi antar lembaga untuk sinkronisasi peraturan yang lebih baik.

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan melaksanakan upaya yang tepat, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

3. Yang menjadi landasan filosofis dan yuridis pembentukan peraturan daerah kabupaten Manggarai tentang perizinan berbasis risiko

Landasan Filosofis

Landasan Filosofis: Pertimbangan yang mencerminkan nilai-nilai dan pandangan hidup yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, memberikan justifikasi moral terhadap peraturan⁷ Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari suatu usaha. Di Kabupaten Manggarai, penerapan sistem ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan.

Landasan filosofis dari perizinan berusaha berbasis risiko dapat dilihat dari beberapa perspektif:⁸

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, terutama di Kabupaten Manggarai. Dengan mengedepankan keadilan, sistem ini tidak hanya berfokus pada kemudahan bagi pelaku usaha, tetapi juga memastikan bahwa hak dan kepentingan masyarakat serta lingkungan tetap terlindungi.

Setiap pelaku usaha, baik besar maupun kecil, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan izin usaha. Dalam konteks Manggarai, hal ini sangat penting untuk

⁷ Nafiatul Munawaroh, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis"

⁸ Landasan Sosiologis. (2023). Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kab. Manggarai

memberdayakan usaha mikro dan kecil yang sering kali terpinggirkan. Kebijakan perizinan harus memberikan perhatian khusus kepada UMKM, dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang terjangkau. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam perizinan berbasis risiko, setiap usaha harus dievaluasi berdasarkan potensi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini memastikan bahwa usaha yang berpotensi merugikan tidak diberikan izin secara sembarangan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perizinan dapat meningkatkan rasa keadilan. Misalnya, masyarakat dapat memberikan masukan atau keberatan terhadap usaha yang dianggap berisiko. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Semua usaha harus diperlakukan sama, tanpa memandang status sosial atau ekonomi pemiliknya.

Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu merumuskan regulasi yang jelas dan adil dalam proses perizinan berbasis risiko. Ini termasuk pengaturan yang mendukung keberlangsungan UMKM dan perlindungan masyarakat. Mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam perizinan sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses ini. Membentuk forum antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perizinan dan dampak usahanya.

2. Prinsip Efisiensi

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pendekatan yang diadopsi oleh pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha. Prinsip efisiensi menjadi sangat penting dalam konteks ini, terutama dalam meningkatkan daya saing dan menarik investasi.

Prinsip efisiensi dalam perizinan berusaha berbasis risiko dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

- **Pengurangan Waktu dan Biaya:** Dengan menerapkan sistem ini, diharapkan proses perizinan dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini

menguntungkan pelaku usaha, terutama UMKM, yang memiliki keterbatasan sumber daya.

- Sederhana dan Transparan: Proses perizinan yang jelas dan transparan akan mengurangi kebingungan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- Prioritas pada Investasi: Dengan memfokuskan pada usaha yang berisiko rendah, pemerintah dapat lebih mudah menarik investasi. Ini penting bagi Kabupaten Manggarai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Meskipun prinsip efisiensi sangat bermanfaat, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya di Kabupaten Manggarai:

- Sosialisasi dan Edukasi: Diperlukan upaya yang maksimal untuk mensosialisasikan sistem perizinan berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat agar mereka memahami prosedur dan manfaatnya.
- Sumber Daya Manusia: Ketersediaan SDM yang terampil dan memahami sistem baru ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan baik dan efisien.
- Infrastruktur Pendukung: Infrastruktur yang memadai, baik fisik maupun teknologi informasi, diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sistem perizinan yang efisien.

Penerapan prinsip efisiensi dalam perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai sangat berpotensi untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Manggarai dapat menjadi daerah yang lebih menarik bagi investor dan lebih berdaya saing dalam perekonomian nasional.

3. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam perizinan berusaha berbasis risiko merupakan elemen kunci yang mendukung lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Di Kabupaten Manggarai,

penerapan prinsip ini sangat penting untuk menarik investasi dan meningkatkan iklim usaha. Prinsip transparansi dalam konteks perizinan berusaha berbasis risiko mencakup beberapa aspek berikut:

- Keterbukaan Informasi : Semua informasi terkait proses perizinan harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha. Ini meliputi syarat, prosedur, dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin.
- Sistematisasi Proses : Proses perizinan perlu disusun secara sistematis agar pelaku usaha memahami langkah-langkah yang harus diambil. Hal ini dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.
- Pengawasan dan Akuntabilitas : Pengawasan yang ketat terhadap proses perizinan memastikan bahwa semua pihak bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas juga penting agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
- Partisipasi Publik : Melibatkan masyarakat dalam proses perizinan, seperti melalui forum atau konsultasi publik, dapat meningkatkan rasa percaya dan mendukung keputusan yang lebih baik.

Di Kabupaten Manggarai, penerapan prinsip transparansi dalam perizinan berusaha berbasis risiko dapat dilakukan dengan beberapa langkah:

- Pengembangan Portal Informasi : Membuat portal online yang menyediakan semua informasi terkait izin usaha, termasuk panduan, formulir, dan status izin.
- Sosialisasi dan Pelatihan : Menyelenggarakan sosialisasi untuk pelaku usaha mengenai peraturan terbaru dan prosedur perizinan yang berlaku, agar mereka lebih memahami dan mematuhi ketentuan.
- Evaluasi Berkala : Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem perizinan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada.

Prinsip transparansi dalam perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Dengan

mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha, serta menarik lebih banyak investasi ke daerah tersebut.

4. Prinsip Inovasi

Inovasi dalam perizinan berusaha berbasis risiko merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan di daerah, termasuk di Kabupaten Manggarai. Prinsip inovasi ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan izin sambil tetap menjaga aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

- a. Pengurangan Beban Administratif : Inovasi dalam perizinan berbasis risiko berfokus pada pengurangan beban administratif bagi pengusaha. Ini termasuk simplifikasi dokumen dan proses, sehingga pelaku usaha dapat lebih cepat mendapatkan izin.
- b. Pendekatan Berbasis Risiko : Proses perizinan harus mempertimbangkan tingkat risiko dari jenis usaha yang diajukan. Usaha dengan risiko rendah dapat melalui proses yang lebih sederhana dibandingkan dengan usaha yang berisiko tinggi, yang memerlukan evaluasi lebih mendalam.
- c. Digitalisasi Proses Perizinan : Penerapan teknologi informasi sangat penting dalam mengembangkan sistem perizinan yang lebih transparan dan efisien. Dengan sistem online, pelaku usaha dapat mengajukan izin tanpa harus datang ke kantor pemerintahan, yang dapat menghemat waktu dan biaya.
- d. Partisipasi Pemangku Kepentingan Inovasi : juga melibatkan pelibatan pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Melalui dialog dan kerja sama, kebijakan perizinan dapat disusun dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak.
- e. Monitoring dan Evaluasi : Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perizinan yang telah diimplementasikan. Hal ini untuk memastikan bahwa inovasi yang diterapkan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Prinsip inovasi dalam perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai dapat menjadi solusi untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Dengan mengedepankan efisiensi, transparansi, dan partisipasi, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Landasan Sosiologis

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, memiliki landasan sosiologis yang mengedepankan peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam proses perizinan, serta mendukung pelaku usaha melalui analisis risiko yang akuntabel⁹. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Manggarai merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks sosiologis, pemahaman tentang kebijakan ini sangat penting, karena berkaitan dengan interaksi sosial, struktur masyarakat, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Struktur Sosial di Kabupaten Manggarai memiliki peran yang krusial dalam memahami implementasi perizinan ini. Kelas ekonomi yang beragam, mulai dari pelaku usaha mikro hingga besar, mempengaruhi bagaimana kebijakan ini diterima. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), kemudahan dalam mendapatkan izin dapat membuka peluang baru dan meningkatkan daya saing mereka. Namun, kesenjangan antara kelas ekonomi yang berbeda bisa menjadi tantangan, di mana pelaku usaha yang lebih berpengalaman mungkin lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kebijakan dibandingkan dengan yang baru memulai.

Interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan adanya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Masyarakat yang merasa diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan cenderung

⁹ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
DI KOTA BOGOR

lebih mendukung kebijakan tersebut. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah menjadi sebuah harapan, di mana mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan peluang usaha yang inovatif. Dari sisi dampak sosial, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dengan semakin banyak usaha yang mendapatkan izin, potensi untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Manggarai meningkat. Hal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan berkontribusi pada stabilitas sosial, mengurangi ketegangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Persepsi negatif mengenai potensi korupsi dalam proses perizinan sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal. Selain itu, kesiapan infrastruktur dan dukungan pemerintah dalam implementasi kebijakan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan perizinan berbasis risiko. Secara keseluruhan, landasan sosiologis dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya memiliki implikasi ekonomi, tetapi juga dampak yang signifikan pada struktur sosial dan interaksi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mendasari pelaksanaan suatu kebijakan, peraturan, atau kegiatan tertentu dalam suatu negara. Dalam konteks hukum, landasan yuridis sangat penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah atau individu sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) merupakan sistem yang diterapkan untuk mempermudah proses perizinan bagi para pelaku usaha dengan memperhatikan tingkat risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut. Di Kabupaten Manggarai, penerapan PBBR memiliki landasan yuridis yang penting untuk diperhatikan.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : UU Cipta Kerja mengatur tentang penyederhanaan regulasi dan perizinan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Salah satu poin penting dari undang-undang ini adalah pengenalan sistem perizinan berbasis risiko, yang membagi usaha ke dalam kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha: PP ini menjelaskan secara lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Di dalamnya terdapat petunjuk mengenai bagaimana pemetaan risiko dilakukan serta prosedur perizinan untuk masing-masing kategori risiko. Landasan yuridis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia yang berakar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang juga mengatur penyelenggaraan perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan norma, standar, dan prosedur untuk implementasi ini, serta mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaannya¹⁰
3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai : Setiap daerah berhak untuk menyusun peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan PBBR sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Perda ini dapat berisi ketentuan tentang jenis usaha yang termasuk dalam kategori risiko tertentu, serta prosedur yang harus diikuti oleh pelaku usaha di daerah tersebut.
4. Regulasi Turunan dan Petunjuk Teknis : Selain peraturan di atas, penting juga untuk memperhatikan regulasi turunan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kabupaten Manggarai. Regulasi ini biasanya berisi prosedur administratif yang harus diikuti oleh pemohon izin serta kriteria penilaian risiko.

Implementasi PBBR di Kabupaten Manggarai harus dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

¹⁰ Erizka Permatasari, 2021 “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”

Sosialisasi mengenai sistem ini sangat penting agar semua pihak memahami prosedur dan manfaat dari PBBR. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan PBBR meliputi kurangnya pemahaman dari pelaku usaha tentang sistem ini, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam melakukan evaluasi risiko. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Manggarai memiliki landasan yuridis yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan kerjasama antara semua pihak terkait serta dukungan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan. Dengan demikian, diharapkan PBBR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

4. sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kab. Manggarai tentang perizinan berusaha berbasis resiko

Jangkauan dan Arah Pengaturan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) merupakan pendekatan yang diterapkan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang terkait dengan suatu usaha. Di Kabupaten Manggarai, kebijakan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal dengan menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan efisien.

Jangkauan PBBR di Kabupaten Manggarai meliputi berbagai sektor usaha, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan sektor industri. Setiap sektor memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda, sehingga PBBR memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan persyaratan perizinan sesuai dengan tingkat risiko yang ada. Usaha dikelompokkan menjadi kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi, di mana usaha dengan risiko yang lebih rendah akan mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan, sedangkan yang memiliki risiko tinggi akan dikenakan prosedur yang lebih ketat. Dalam hal arah pengaturan, pemerintah daerah perlu menetapkan regulasi yang jelas mengenai PBBR. Hal ini mencakup penentuan prosedur, syarat, dan ketentuan yang harus diikuti oleh para pelaku usaha. Sosialisasi yang efektif juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan pelaku

usaha memahami kebijakan ini dan dapat memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyuluhan yang intensif untuk menjelaskan manfaat dan mekanisme PBBR.

Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi menjadi bagian integral dari implementasi PBBR. Diperlukan mekanisme pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kepuasan masyarakat. Akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan PBBR. Kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga swasta, akan memperkuat penerapan kebijakan ini dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengembangan ekonomi daerah.

Dengan demikian, PBBR di Kabupaten Manggarai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan, mendorong investasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Manggarai merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang akan dijalankan. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko dalam perizinan usaha.

Ruang lingkup pengaturan ini mencakup beberapa aspek penting yang perlu dipahami oleh pelaku usaha dan pihak terkait:

- **Klasifikasi Usaha Berdasarkan Risiko:** Usaha dikategorikan ke dalam beberapa tingkat risiko, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan jenis perizinan yang diperlukan. Misalnya, usaha dengan risiko rendah mungkin hanya memerlukan pendaftaran sederhana, sementara usaha dengan risiko tinggi memerlukan izin yang lebih kompleks dan ketat.

- **Prosedur Pengajuan Izin:** Pengaturan ini menetapkan prosedur yang jelas dan efisien bagi pelaku usaha dalam mengajukan izin. Hal ini mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi serta dokumen yang diperlukan untuk setiap jenis usaha. Dengan prosedur yang lebih sederhana, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan izin yang diperlukan. **Evaluasi dan Penilaian Risiko:** Setiap jenis usaha akan dievaluasi berdasarkan potensi risiko yang ditimbulkan. Proses ini melibatkan analisis terhadap dampak lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang mungkin terjadi akibat kegiatan usaha tersebut. Penilaian risiko ini penting untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan tidak membahayakan masyarakat atau lingkungan sekitar.
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pengaturan ini juga mencakup mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Jika terdapat pelanggaran, sanksi yang sesuai akan diterapkan untuk menjaga kepatuhan dan integritas sistem perizinan.
- **Sosialisasi dan Edukasi:** Pentingnya sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai perizinan berbasis risiko menjadi salah satu fokus dalam pengaturan ini. Edukasi yang baik akan membantu pelaku usaha memahami proses perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Tujuan utama dari pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Manggarai adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Dengan mempermudah proses perizinan, diharapkan dapat menarik lebih banyak investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha, terutama yang memiliki risiko tinggi. Secara keseluruhan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Manggarai merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perizinan. Dengan memahami ruang lingkup materi pengaturan ini, pelaku usaha diharapkan dapat beradaptasi dengan

baik dan mematuhi regulasi yang ditetapkan, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Manggarai menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan norma perizinan. Dengan mengadopsi asas keterbukaan, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, berbasis risiko, dan keberlanjutan, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Penerapan perizinan berbasis risiko diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, sambil tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha.

B. Saran

1. Peningkatan Partisipasi Publik: Disarankan agar pemerintah Kabupaten Manggarai lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses penyusunan norma perizinan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, sosialisasi, dan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan yang konstruktif.
2. Pelatihan dan Sosialisasi: Pemerintah perlu mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai perizinan berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat. Ini penting agar semua pihak memahami prosedur, manfaat, dan tanggung jawab yang terkait dengan perizinan.
3. Monitoring dan Evaluasi: Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai implementasi peraturan perizinan berbasis risiko. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang muncul dan melakukan perbaikan yang diperlukan secara berkala.

4. Penguatan Kerjasama Antar Instansi: Disarankan untuk memperkuat kerjasama antar instansi pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait perizinan. Sinergi ini akan memastikan bahwa semua aspek perizinan dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Fokus pada Keberlanjutan:1. Dalam setiap proses perizinan, penting untuk selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Manggarai dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2021). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kab. Manggarai. (2024).
- Teori Kelembagaan. (2023). Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kab. Manggarai.
- Partisipasi Pemangku Kepentingan Inovasi. (2023). Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kab. Manggarai.
- Landasan Sosiologis. (2023). Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kab. Manggarai.
- Metode Penyusunan Naskah Akademik. (2023). Dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kab. Manggarai.
- Erizka Permatasari, 2021 "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko"
- Adrian Sutedi " Pengertian Perizinan"
- Adam Smith " Pengertian Ilmu Ekonomi"
- Robin dan Coulter (2002) "Pengertian Manajemen"
- A. Hoogerwert " Pengertian kebijakan publik"

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Nafiatul Munawaroh, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis"

<https://www.manggarakab.go.id/wabup-heri-buka-kegiatan-bimtek-oss-rba-lkpm-online-dikecamatan-langke->

Anjar Setiarma, Wilson Tungmiharja, Simona Bustani, 2024 "Implikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Percepatan Investasi Di Indonesia"